

PERAN HAJI ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH DALAM MAJELIS ULAMA INDONESIA (1975-1981)

Dimas Lucky Wijayanto¹ dan Rhoma Dwi Aria Y, S.Pd, M.Pd.²
Universitas Negeri Yogyakarta
dimasluckywijayanto@gmail.com¹

ABSTRAK

Peran Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) tidak terlepas dari kepemimpinannya yang mampu mengubah pandangan negatif berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) Perjalanan hidup Hamka; (2) Mengapa dibentuknya MUI dan bagaimana terpilihnya Hamka sebagai ketua umum MUI; (3) Mengetahui bagaimana kepemimpinan Hamka di MUI.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, berdasarkan metodenya Kuntowijoyo. Metode sejarah memiliki 5 tahap, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, Verivikasi, interpretasi dan penulisan.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Hamka sejak kecil sudah diajarkan ilmu agama oleh ayahnya, saat besar pemikiran tokoh agama di Jawa, Mekah dan Mesir mempengaruhi pemikirannya. Kekaguman terhadap Mesir membuatnya menjadi penyebar kebudayaan Mesir di Indonesia. Kemampuan agamanya membawa Hamka dikenal oleh masyarakat dan pemerintah sebagai ulama hingga ia menjadi ulama penting dalam pembentukan MUI; (2) MUI dibentuk karena adanya pembatasan peran ulama dalam masalah agama saja. Perlunya sebuah peran baru bagi para ulama, pemerintah membentuk MUI sebagai wakil muslim se Indonesia. Hingga MUI terbentuk dalam Musyawarah Nasional I tanggal 21 sampai 27 Juli 1975. Musyawarah Nasiona I juga memutuskan Hamka sebagai ketua umum MUI secara aklamasi tanpa adanya calon ketua lain; (3) Selama kepemimpinan Hamka melakukan kebijakan intern dan kebijakan ekstern. Kebijakan yang lebih giat ia lakukan adalah kebijakan dalam bentuk fatwa. Fatwa tersebut dibuat berdasarkan tiga faktor yaitu berdasarkan permasalahan agama yang ada, fatwa yang dibuat untuk membantu kebijakan pemerintahan, dan fatwa yang dibuat karena keresahan umat terhadap Kristenisasi. Saat kepemimpinan Hamka, MUI mampu tumbuh berkembang dengan pesat dan keberadaan MUI telah memberikan manfaat bagi pemerintah dan umat Islam di Indonesia.

Kata Kunci: *Peran, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Majelis Ulama Indonesia, 1975-1981.*

HAJI ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH'S ROLES IN THE INDONESIAN ULEMA COUNCIL (1975-1981)

Dimas Lucky Wijayanto¹ dan Rhoma Dwi Aria Y, S.Pd, M.Pd.²

Yogyakarta State University
dimasluckywijayanto@gmail.com

ABSTRACT

Haji Abdul Malik Karim Amrullah's (Hamka) roles could not be separated from his leadership capable of changing the negative view of the establishment of the Indonesian Ulema Council (IUC). This study aimed to investigate: (1) Hamka's life, (2) why IUC was established and how Hamka was appointed as the head of IUC, and (3) Hamka's leadership in IUC.

The study employed the historical method by Kuntowijoyo. The historical method consisted of 5 stages, namely topic selection, source collection, verification, interpretation, and writing.

The results of the study were as follows. (1) Since his childhood Hamka was taught religious knowledge by his father; when he was adult, the ideas from religious figures in Java, Mecca, and Egypt influenced his ideas. His admiration of Egypt made him one spreading the Egyptian culture in Indonesia. His religious capability made Hamka known by people and the government as an ulema so that he became an important ulema in the establishment of IUC. (2) IUC was established because ulemas' roles were limited in the religious affairs only. Ulemas needed to play new roles so that the government established IUC as representatives of Muslims in Indonesia. IUC was established in National Conference I held from 21 to 27 July 1975. National Conference I also made a decision that Hamka was appointed as the head of IUC through acclamation without any other prospective heads. (2) As a leader, Hamka made internal and external policies. The policies that he often made were those in the form of *fatwa* (advice). The advice was based three factors, namely that based on existing religious problems, that made to help government policies, and that made due to Muslims' worries about Christianization. Under Hamka's leadership, IUC was able to grow and thrive and the existence of IUC gave benefits to the government and Muslims in Indonesia.

Keywords: *roles, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Indonesian Ulema Council, 1975-1981*

I. Pendahuluan

Ulama merupakan salah satu orang yang memiliki pengaruh di Indonesia. Jumlah pemeluk agama Islam yang menjadi mayoritas, membuat peran ulama menjadi tokoh penting di Indonesia. Banyak dari ulama yang menjadi panutan bahkan pimpinan dari sebuah organisasi besar. Melalui pemikiran-pemikirannya, ulama mampu membantu pemerintahan dengan tokoh keulamaannya. Salah satu ulama yang berpengaruh dalam perkembangan Islam di Indonesia adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Perkembangan Islam di Indonesia pada era Orde Baru merupakan salah satu pengaruh Hamka dengan kepemimpinannya di Majelis Ulama Indonesia.¹

Haji Abdul Malik Karim Amrullah² atau lebih dikenal dengan Hamka, adalah seorang alim ulama yang lahir di Sungai Batang Kabupaten Maninjau Provinsi Sumatra Utara. Hamka dilahirkan pada hari *Ahad*, tanggal 16 Februari 1908 M/13 *Muharam* 1326 H dari kalangan keluarga yang taat beragama.³ Hamka merupakan anak pertama dari pasangan Dr. Abdul Karim Amrullah dan Shafiyah. Latar belakang keturunan dari keluarga ulama, membuat Sejak kecil mendapatkan dasar-dasar agama dan belajar Alquran langsung dari ayahnya.⁴ Selain mendapat pendidikan agama langsung dari ayahnya, ia juga mendapatkan pendidikan formal di Sekolah Desa. Hamka juga dimasukkan ke sekolah pendidikan agama di *Diniyah School* serta Sumatra Thawalib.

Pada tahun 1924 Hamka berangkat ke Jawa dan langsung menuju ke Yogyakarta. Hamka bertemu dengan tokoh-tokoh Islam dan banyak memperoleh pemikiran Islam modern. Ia melihat perbedaan yang jelas antara Islam yang hidup di Minangkabau dengan Islam yang ia temui di Yogyakarta.⁵ Sebelum kembali ke Maninjau, Hamka singgah ke rumah iparnya, A.R. Sutan Mansur di Pekalongan. Ia banyak belajar dari iparnya, baik tentang Islam yang dinamis maupun politik. Hingga sampai bulan Juni 1925, Hamka kembali ke Maninjau dengan membawa semangat dan wawasan baru tentang Islam. Sekembalinya dari Jawa dimulailah karir Hamka. Melalui tulisannya dengan semangat modernis Islam, mulai terlihat kemampuan Hamka di jurnalistik. Karirnya di Muhammadiyah mulai diperhitungkan, terutama ketika ia menjadi pembicara Kongres Muhammadiyah ke-19 di Bukit Tinggi tahun 1930.⁶ Meskipun mengalami beberapa hambatan, namun karirnya terlihat baik. Hal ini dapat dilihat bahwa dari tahun 1952-1981, berbagai jabatan penting pernah didudukinya. Hingga pada tahun 1975-1981 Hamka menjabat sebagai ketua MUI yang pertama dan terpilih dalam dua periode berturut-turut.⁷

Pembentukan MUI tidaklah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak pertentangan mengenai pembentukan majelis ini. Banyak dari para ulama maupun masyarakat beranggapan Majelis ini hanya akan menjadi alat pemerintah untuk melancarkan kebijakan-kebijakannya. Sebagai Ketua Umum MUI yang pertama, Hamka berusaha mengubah anggapan negatif terhadap MUI. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Hamka mampu mengubah pemikiran negatif tentang berdirinya MUI. Meskipun Hamka mampu mengubah pandangan negatif tentang pembentukan MUI, perjalanannya sebagai ketua umum harus ia lepaskan karena kebijakannya yang ia buat.

¹ Selanjutnya ditulis MUI.

² Selanjutnya ditulis Hamka.

³ Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm, 15.

⁴ *Ibid*, hlm. 18.

⁵ Pada saat itu Islam di Minangkabau berkembang seiring dengan percampuran budaya adat yang di pegang teguh oleh ketua adat dan masyarakat Minangkabau. Pertentangan agama timbul hanya dari internal saja. Akibatnya umat kurang termotivasi untuk memperdalam penyelidikan atas ajaran agamanya, guna memunculkan islam yang dinamis, tanpa taklid. Akan tetapi pembicaraan umat hanya berputar diseperti hal-hal yang bersifat *khilafiah*. Lihat Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 27.

⁶ *Ibid*, hlm. 30.

⁷ Depertemen Penerangan RI, *10 Tahun Majelis Ulama Indonesia (26 Juli 1975-26 Juli 1985)*., (Departemen Penerangan RI, 1985), hlm, 142.

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian yang berjudul *Peran Haji Abdul Malik Karim Amrullah Dalam Majelis Ulama Indonesia (1975-1981)* ini berangkat dari rumusan masalah yang disusun oleh penulis. Penelitian ini menggunakan buku yang berjudul *Kenang-Kenangan Hidup Jilid I* karya Hamka. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Hamka dari kecil hingga masa remajanya dan hingga ia menjabat menjadi ketua MUI.

Alasan dibentuknya MUI dan bagaimana kepemimpinan Hamka dalam MUI menggunakan buku yang berjudul *10 Tahun Majelis Ulama Indonesia (26 Juli 1975 - 26 Juli 1985)* yang diterbitkan oleh Departemen Penerangan Republik Indonesia pada tahun 1985. Buku ini menjelaskan MUI dari segi latar belakang, peran dan beberapa amanat dan sambutan dari Pemerintah dan ketua MUI dalam beberapa acara. Peneliti juga menggunakan *Buletin Majelis Ulama Indonesia* yang dikeluarkan langsung oleh Majelis ini. Buletin yang dikeluarkan oleh MUI ini berisi tentang kinerja tugas MUI pada saat itu.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk membangun kerangka konseptual adalah metode sejarah *komparatif*, yaitu sebuah metode analisis yang dilakukan dengan cara memperbandingkan dua atau beberapa fakta (ide) yang berbeda, untuk selanjutnya berusaha menemukan sebuah kesimpulan baru.⁸ Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo. Penelitian sejarah mempunyai lima tahap. Kelima tahap tersebut yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi: analisis dan sintesis, dan penulisan.⁹

II. Pembahasan

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Hamka lahir pada hari *Ahad* tanggal 16 Februari 1908 M/ 13 *Muharam* 1326H di Ranah Minangkabau, desa Kampung Molek, Nagari Sungai Batang, di tepian danau Maninjau, Luhak Agam, Sumatra Barat. Hamka merupakan putra dari Abdul Karim Amrullah seorang ulama yang cukup terkenal di Sumatera. Abdul Karim Amrullah merupakan salah satu dari empat tokoh yang paling berpengaruh di Minangkabau.¹⁰

Haji Abdul Malik Karim Amrullah sejak kecil sudah diajarkan ilmu agama oleh ayahnya Abdul Karim Amrullah. Selain bersekolah di Sekolah Desa, Haji Abdul Karim Amrullah memasukan Hamka ke sekolah pendidikan agama yaitu *Diniyah School* dan Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Saat bersekolah di Sumatera Thawalib ia bertemu dengan guru yang bernama Syekh Zainuddin Labay el-Yunusiy. Lewat gurunya ini, Hamka mengenal dan mulai tertarik dengan pemikiran Djamiludin Al-Afgani serta Muhammad Abduh lewat perpustakaan yang dimilikinya. Saat menginjak 16 tahun, Hamka merantau ke Jawa. Ia singgah di Yogyakarta tempat pamannya Ja'far Amrullah. Saat di Yogyakarta, ia berkenalan dan belajar dengan beberapa tokoh agama, seperti Ki Bagus Hadikusumo, R.M. Soeryopranoto, K.H. Mas Mansur, Haji Fachruddin, HOS Tjokroaminoto, dan terutama A.R. Sutan Mansur.¹¹ Bersama A.R Sutan Mansur, Hamka banyak mempelajari tentang Islam yang dinamis

⁸ Anton Bakker & Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm, 50.

⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng Budaya. 2001), hlm, 89.

¹⁰ Dr. H. Abdul Karim Amrullah, Dr. H. Abdullah Ahmad, Syekh Muhammad Jamil Jambek dan Syekh Tahir Jalaludin Al-Azhari merupakan empat pembaharu yang paling berpengaruh di Minangkabau. Syekh Tahir Jalaludin Al-Azhari tidak terlibat langsung dalam kegiatan pembaharuan di Minangkabau. Syekh Tahir merupakan ulama paling tua, tidak saja di anggap sebagai rekan, tetapi juga salah satu dari guru mereka. Nama Syekh Muhammad Thaib Umar dari Sungayang, Batusangkar, acap kali ditambahkan dalam daftar ini. Lihat Murni Djamil, *DR. H. ABDUL KARIM AMRULLAH Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaharuan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20*, (Jakarta: Indonesia-Netherland Cooperation in Islamic Studies, 2002), hlm, 18.

¹¹ Shobahus Surur , *Mengenang 100 Tahun Hamka*, (Jakarta: Yayasan Pesantren Islam al-Azhar, 2008), hlm, 20.

maupun politik. Hamka mulai lebih mengenal ide-ide pembaruan Al-Afgani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha yang mempengaruhi pemikirannya. Mulai dari sini, Hamka lebih tertarik dengan pemikiran dan kebudayaan dari Timur Tengah terutama dari Mesir. Kekaguman terhadap pemikiran Islam dan kebudayaan Mesir membuatnya berfikir untuk menyebarkan kebudayaan ini. Hal ini ia lakukan melalui ceramah dan karyanya yang banyak mengangkat tema mengenai kebudayaan dan pemikiran Mesir. Atas peran yang Hamka lakukan, ia mendapat Penghargaan atas gelar *Doktor Honoris Causa* dari Universitas Al Azhar Mesir.

Pada tahun 1927 Hamka pergi ke Mekah. Hamka melakukan ibadah Haji sekaligus memperdalam ilmu agama. Satu setengah tahun di Mekah, Hamka memutuskan untuk kembali ketanah kelahirannya dan memberanikan diri untuk melakukan dakwah dengan wawasan dan ilmu yang diperolehnya. Kemampuan menulis dan berpidato, membawa Hamka mulai dikenal oleh masyarakat dan masuk dalam organisasi Muhammadiyah dan aktif di jurnalistik. Karinya terus terlihat baik di Muhammadiyah dan jurnalistik.

Tahun 1950 dimulai lah karir Hamka sebagai Pegawai Kementerian Agama yang pada waktu itu menterinya adalah K.H. Wahid Hasyim.¹² Hamka mengemban tugas sebagai Anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia. Sepuluh tahun di pemerintahan, ia melepaskan jabatannya. Keaktifannya di Masyumi membuatnya harus mundur dari Kementerian Agama. Hal tersebut dikarenakan adanya peraturan yang dikeluarkan presiden mengenai larangan berpolitik bagi setiap pegawai negara. Meski dalam perjalanan karirnya Hamka mengalami hambatan, namun karirnya semakin terlihat. Ia bahkan sempat menduduki jabatan-jabatan penting seperti anggota Badan Musyawarah Kebajikan Nasional, Anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia, Badan Pertimbangan Kebudayaan Kementerian PP dan K, Guru Besar Perguruan Tinggi Islam dan Universitas Islam di Makasar, Penasihat Kementerian Agama, Ketua Kurator PTIQ. Hingga Pada tahun 1975 Hamka menjabat dipilih sebagai ketua umum MUI yang pertama.

Pada awal pembentukan MUI, terlalu banyak kecurigaan yang muncul oleh ulama Islam. Hal ini dikarenakan adanya hubungan yang kurang baik antara ulama Islam dengan pemerintah pada saat itu. Selalu ada kecurigaan yang terjadi antara ulama dengan pemerintah. Apapun yang baik yang hendak ulama Islam lakukan selalu dicurigai oleh pemerintah. Begitupun sebaliknya secara apriori menganggap segala upaya dan peraturan yang datang dari pemerintah untuk mengatur dan membangun negara semuanya salah. Para ulama kehilangan pertimbangan pada setiap apapun yang datang dari pemerintah. Terlebih lagi setelah adanya pembatasan peran ulama yang hanya pada masalah agama saja.

MUI dibentuk oleh pemerintah memang karena adanya pembatasan peran ulama dalam pemerintahan. Hal ini dilakukan pemerintah dengan menyatukan seluruh partai politik yang bernaung dibawah panji agama untuk menyatu dalam Partai Persatuan Pembangunan. Pembatasan peran ulama ini menyebabkan para ulama mundur dari kegiatan politik dan kembali mengajar ilmu-ilmu agama saja. Perlunya sebuah peran baru bagi para ulama di masyarakat, pemerintah membentuk majelis yang berlaku secara nasional untuk para ulama mewakili kaum muslim se Indonesia. MUI dibentuk dalam Musyawarah Nasional I yang berlangsung di Senayan pada tanggal 21-27 Juli 1975. Musyawarah yang berlangsung selama 7 hari ini di hadiri oleh berbagi kalangan pemuka agama. Peserta Musyawarah Nasional Ulama ini terdiri dari para wakil majelis-majelis ulama daerah yang baru dibentuk, para wakil pengurus pusat sepuluh organisasi Islam yang ada, sejumlah ulama bebas dan empat orang wakil rohaniwan Islam ABRI.¹³ Musyawarah ini di akhiri dengan sebuah keputusan bersama dengan didirikannya sebuah wadah perkumpulan ulama berskala Nasional dengan nama MUI. Kesepakatan ini di tuangkan dalam sebuah Piagam yang di tanda tangani oleh seluruh peserta Musyawarah.

¹² Rusdy Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. DR. HAMKA* (cet-2), (Jakarta: Panjimas, 1983), hlm, 4.

¹³ M. Atho Mudzhar, *FATWA-FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1985), hlm, 56.

Musyawarah Nasional I juga membahas pemilihan ketua umum MUI. Hamka dipilih secara aklamasi dan tidak ada calon lain yang diajukan untuk menjabat sebagai ketua umum MUI.¹⁴ Hamka tetap menjadi calon tunggal dalam rapat tersebut, meskipun terdapat tokoh-tokoh agama lainnya yang pantas menjadi calon ketua umum. Tampaknya pemilihan ketua umum telah dipersiapkan sebelum berlangsungnya Musyawarah Nasional I. Hamka telah dihubungi Departemen Agama, Menteri Mukti ali melalui perwakilannya untuk menerima jabatan sebagai ketua umum MUI. Hingga pada tanggal 27 Juli 1975 Hamka resmi dilantik sebagai ketua umum MUI.

Saat kepemimpinannya di MUI, ia melakukan kebijakan-kebijakan intern (ke dalam MUI) maupun kebijakan ekstern (kebijakan keluar MUI). Mulai dari perumusan tata kerja MUI untuk merealisasikan amanat pada Musyawarah Nasional ke I. Tata Kerja MUI disahkan pada rapat Paripurna tanggal 12 September 1957.¹⁵ Hal yang dilakukan ini dirasa penting untuk menentukan tahapan kerja MUI untuk selanjutnya. Pada saat periode kepemimpinan Hamka, MUI dibagi menjadi lima bidang komisi yaitu Komisi Fatwa, Komisi Ukhuwah Islamiyah, Komisi Kerukunan Umat Beragama, Komisi Peningkatan kerjasama Ulama Umara, dan Komisi Umum. Kebijakan keluar yang dilakukan Hamka selain menjalin hubungan dengan pemerintah, melakukan hubungan dengan organisasi Islam yang ada dan mengenalkan majelis ini kepada masyarakat melalui kunjungan dan dakwah-dakwah, MUI lebih giat melakukan kebijakan dalam bentuk fatwa. Fatwa tersebut dibuat berdasarkan tiga faktor yaitu (1) Fatwa yang dibuat berdasarkan permasalahan agama yang ada dimasyarakat, (2) Fatwa yang dibuat untuk membantu kebijakan pemerintahan dan (3) Fatwa yang dibuat karena keresahan umat dan ulama terhadap kristenisasi pada penganut Islam pada masa itu.

Saat kepemimpinan Hamka, MUI mampu tumbuh dan berkembang dengan pesat. Dibawah kepemimpinannya, MUI lebih giat mengeluarkan fatwa terhadap permasalahan agama. Keberadaan MUI telah banyak memberikan manfaat baik bagi pemerintah, maupun bagi umat Islam Indonesia pada umumnya.

III. Kesimpulan

Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) adalah ulama yang dilahirkan dari keluarga ulama. Sejak kecil Hamka sudah diajarkan ilmu agama oleh ayahnya Haji Abdul Karim Amrullah. Sejalan perkembangannya, Hamka mulai mengenal pemikiran-pemikiran Islam dari tokoh di Jawa, Mekah dan Mesir. Pemikiran dan kebudayaan Mesir adalah salah satu pemikiran dan kebudayaan yang ia kagumi. Atas kekagumannya itu, Hamka sempat menjadi penghubung kebudayaan Mesir di Indonesia. Melalui pemikiran mengenai agamanya, Hamka mulai dikenal oleh masyarakat maupun pemerintah. Bermula dari Muhammadiyah namanya terus terdengar, hingga Hamka masuk dalam Masyumi dan masuk dalam pemerintahan, hingga pada tahun 1975 ia menjabat sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pertama.

MUI dibentuk karena berkurangnya peran ulama dalam pemerintahan. Ulama hanya dibatasi pergerakannya dalam masalah agama saja. Dibuatlah sebuah wadah yang berlaku di seluruh Indonesia untuk para ulama. Dengan dibentuknya MUI dimaksudkan ulama memiliki peran kembali di pemerintahan baik untuk mewakili kaum muslimin di seluruh Indonesia dan juga diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan. Hingga pada tanggal 27 Juli 1975 terbentuklah MUI dalam sebuah Musyawarah Nasional I. Dalam Musyawarah Nasional I juga membahas pemilihan ketua umum MUI. Dalam pemilihan ini Hamka menjadi calon tunggal yang di pilih secara aklamasi, walaupun dalam rapat tersebut terdapat tokoh-tokoh agama lainnya yang pantas menjadi calon. Pada tanggal 27 Juli 1975 Hamka resmi dilantik sebagai ketua umum MUI.

Saat kepemimpinannya di MUI, ia melakukan kebijakan-kebijakan intern maupun kebijakan ekstern. Pemantapan kesiapan intern yang Hamka lakukan, ia membentuk tata kerja majelis ini dan membagi Majelis ini dalam lima bidang (komisi fatwa, komisi ukhuwah Islamiyah, komisi kerukunan

¹⁴ H.A. Mukti Ali, *PRESEPSI BUYA HAMKA: ULAMA SUDAH LAMA TERJUAL*, dalam Natsir Tamara, (ed.), *Hamka di Mata Hati Umat*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm, 55.

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Buletin MAJELIS ULAMA INDONESIA untuk informasi dan komunikasi intern ke 2*, (Jakarta: Redaksi Majelis Ulama Indonesia, 1975), hlm, i-ii.

umat beragama, komisi peningkatan kerja sama ulama dan umara dan komisi umum). Kebijakan keluar yang dilakukan Hamka selain menjalin hubungan dengan pemerintah, melakukan hubungan dengan organisasi Islam yang ada dan mengenalkan majelis ini kepada masyarakat melalui kunjungan dan dakwah-dakwah, Majelis Ulama Indonesia lebih giat melakukan kebijakan dalam bentuk fatwa. Fatwa tersebut dibuat berdasarkan tiga faktor yaitu (1) permasalahan agama yang ada di masyarakat, (2) fatwa yang dibuat untuk membantu kebijakan pemerintahan dan (3) fatwa yang dibuat karena keresahan umat dan ulama terhadap kristenisasi pada penganut Islam pada masa itu. Melalui kebijakannya, Hamka mampu membawa MUI tumbuh dan berkembang pesat. Dibawah kepemimpinannya, Majelis Ulama Indonesia lebih giat mengeluarkan fatwa terhadap permasalahan agama. Keberadaan MUI telah banyak memberikan manfaat baik bagi pemerintah maupun bagi umat Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

Majelis Ulama Indonesia. (1975). *Buletin MAJELIS ULAMA INDONESIA untuk informasi dan komunikasi intern ke 2*. Jakarta: Redaksi Majelis Ulama Indonesia.

Buku:

Anton Bakker & Achmad Charis Zubair. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
Departemen Penerangan RI. (1985). *10 Tahun Majelis Ulama Indonesia (26 Juli 1975.-26 Juli 1985)*. Departemen Penerangan RI.

Kuntowijoyo. (2010). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.

Murni Jamal. (2002). *DR. H. Abdul Karim Amrullah Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaharuan Islam di Minangkabau Pada Awal Abad Ke-20*. Jakarta : Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS).

M. Atho Mudzhar. (1993). *FATWA-FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS).

Rusdy Hamka. (1983). *Pribadi dan Martabat Buya Prof. DR. HAMKA (cet-2)*. Jakarta: Panjimas.

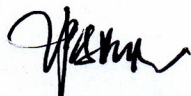
Samsul Nizar. (2008). *Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.

Shobahus Surur. (2008). *Mengenang 100 Tahun Hamka*. Jakarta: Yayasan Pesantren Islam al-Azhar.

Bab/Artikel:

H.A. Mukti Ali. (1983). *Presepsi Buya Hamka: Ulama Sudah Lama Terjual*. Dalam Natsir Tamara, (ed.) *Hamka di Mata Hati Umat*. Jakarta: Sinar Harapan.

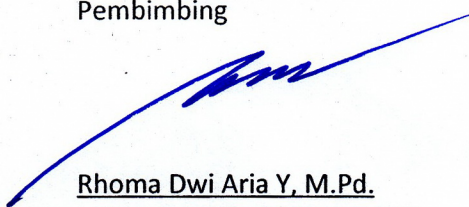
Reviewer



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001

Yogyakarta, 17 Juni 2016

Menyetujui,
Pembimbing



Rhoma Dwi Aria Y, M.Pd.
NIP. 19820704 201012 2 004